

RENCANA KERJA TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaannirrohiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan berkah dan rahmat Nya penyusunan Rencana Kerja 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

Rencana Kerja tahun 2022 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat. Renja tahun 2022 disusun sebagai pedoman operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif.

Semoga dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja 2022, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 ini belumlah sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Renja ini.

Bandung, Oktober 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620923 198810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil	23
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2020	9
Tabel T-II.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan	14
Tabel T-II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat	15
Tabel T-II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022.....	17
Tabel T-II.5 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	21
Tabel T-III. 1 Program dan Kegiatan Indikatif Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.....	25
Tabel T-III. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Disdukcapil dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Barat tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2022 bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan RKPD Tahun 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, Serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ;
3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

1.3. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Disdukcapil Provinsi

Jawa Barat Tahun 2020 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022. Menjelaskan *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022.

Menjelaskan hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

3.3 Program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan. Berdasarkan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/melebihi;
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menilai pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2020 yang dibandingkan dengan Renstra Disdukcapil Tahun 2018-2023 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Disdukcapil Tahun 2020 merencanakan 6 program dan 21 kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 6 program dan 21 kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Disdukcapil sampai dengan Tahun 2020, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2020

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2020	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan								
								I		II		III		IV															
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11 = 8+9+10+11		12 = 12/7*100		13 = 6+12		14 = 14,5*100		15	17					
2	12		Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																										
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																										
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A																									
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi	100	Persen																								
			Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen																								
2	12	01	L01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	50	Dokumen	2.253.750	20	-	10	484.199	1	7.179	3	147.693	1	3.980	5	278.491	10	437.343	100	90,32	30	437.343	60,00	19,41	Sekretariat	
2	12	01	L01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	Dokumen	650.000	14	-	7	65.696	-	6.772	7	58.423	-	-	-	7	65.894	100	99,24	21	65.894	60,00		Sekretariat	
2	12	01	L01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	768	Orang	776.000	-	256	223.113	-	-	64	87.530	-	3.980	192	104.285	256	195.796	100	87,76	256	195.796	33,33		Sekretariat	DAK Non Fisik
2	12	01	L01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dok	635.000	6	-	3	2.640	1	407	2	1.740	-	-	-	3	2.147	100	81,34	9	2.147	60,00		Sekretariat	
2	12	01	L01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	256	Orang	192.750	-	256	192.750	-	-	-	-	-	-	256	174.206	256	174.206	100	90,38	256	174.206	100,00		Sekretariat	DAK Non Fisik

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2020		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			K	Rp.
					I			II		III		IV		I2 = 8-9+10+11			I3 = 12/7*100		I4 = 6+12		I5 = 11/5*100					
1	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	15 Dokumen	52.188.000	6	8.594.976	1.240.848	1	2.439.937	1	2.909.207	1	1.991.347	3	8.581.338	100	99,84	9	8.581.338	60,00	16,44				
2	2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan	70 Bulan	51553.000	28	8.591902	1240.848	3	2.436.879	5	2.909.207	3	1991347	14	8.578.260	100	99,84	42	8.578.260	60,00		Sekretariat			
2	2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	15 Lap	635.000	6	3.074	-	3	3.058	-	-	-	-	3	3.058	100	99,49	9	3.058	60,00		Sekretariat			
2	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian	220 Orang	2.215.000	24	608.800	-	4	23.839	4	89.811	4	444.334	12	557.984	100	91,65	36	557.984	16,36	25,19				
2	2.12.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi penilai kinerja	27 Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan DAK dihapus dipindahkan ke Sub Kegiatan lain	Sekretariat		
2	2.12.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah peserta Pendidikan dan	220 Orang	404.000	40	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	8,18		Sekretariat	Refocusing Anggaran		
2	2.12.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi tentang peraturan	9 Kali	1476.000	-	3	59.515	-	1	23.839	1	89.811	1	356.144	3	469.794	100	90,43	3	469.794	33,33		Sekretariat	DAK Non Fisik	
2	2.12.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek kepada Kab/ Kota	12 Kali	335.000	-	4	89.285	-	-	-	-	-	4	88.190	4	88.190	100	98,77	4	88.190	33,33		Sekretariat	DAK Non Fisik	
2	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi	60 Bulan	8.378.000	24	1.566.764	3	426.461	3	312.588	3	354.224	3	460.537	12	1.553.810	100	99,17	36	1.553.810	60,00	18,55		Sekretariat	
2	2.12.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	2.657.000	24	264.587	3	150.208	-	6	95.875	3	10.000	12	256.083	100	96,79	36	256.083	60,00		Sekretariat			
2	2.12.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan logistik penanganan	60 Jenis	305.000	24	85.000	-	-	-	12	84.887	-	-	12	84.887	100	99,87	36	84.887	60,00		Sekretariat	DAK Non Fisik		
2	2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	60 Bulan	5416.000	12	1217.177	3	276.253	3	312.588	3	173.462	3	450.537	12	1.212.840	100	99,64	24	1.212.840	40,00		Sekretariat	APBD + DAK Non Fisik	
2	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan	60 Bulan	7.500.000	24	1.326.093	3	212.719	3	372.088	3	306.186	3	424.251	12	1.315.243	100	99,18	36	1.315.243	60,00	17,54		Sekretariat	
2	2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	60 Bulan	1475.000	24	217.264	3	370.21	3	38.166	3	69.222	3	72.684	12	217.093	100	99,92	36	217.093	60,00		Sekretariat		
2	2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	6.025.000	24	1.808.829	3	175.698	3	333.922	3	236.964	3	351.567	12	1.098.151	100	99,04	36	1.098.151	60,00		Sekretariat		
2	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi	60 Bulan	3.348.000	24	452.943	4	154.896	4	164.386	4	66.559	-	65.608	12	451.449	100	99,67	36	451.449	60,00	13,48		Sekretariat	
2	2.12.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	60 Bulan	1180.000	24	204.305	3	131.739	3	12.675	3	42.831	3	16.406	12	203.651	100	99,68	36	203.651	60,00		Sekretariat		
2	2.12.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat	60 Bulan	1.170.000	24	88.700	3	-	3	138.716	3	9.054	3	40.876	12	188.646	100	99,97	36	188.646	60,00		Sekretariat		
2	2.12.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	60 Bulan	1.068.000	24	59.938	3	23.157	3	12.995	3	14.675	3	8.326	12	59.152	100	98,69	36	59.152	60,00		Sekretariat		
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	96,64			52,73	18,43						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah						
Program, Kegiatan Thn 2020 berbeda dengan Thn 2021																										

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2020		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K		Rp.		K				Rp.			
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi	83,30	Persen	943.000	81,60	81,60	172.334	11,48	19.789	72,91	125.654	-	-	5,97	10.295	90,36	155.738	111	90,37	172	155.738			FPAK				
			Pelayanan Pendaftaran	Pembinaan Aparatur	135	Kab/Kota	943.000	54	27	99.254	-	-	27	81.425	-	-	9.795	27	91.220	100	91,91	81	91.220	60,00	9,67	FPAK					
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran	Jumlah pengelolaan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran	135	Kab/Kota	943.000	54	27	99.254	-	-	27	81.425	-	-	9.795	27	91.220	100	91,91	81	91.220	60,00		FPAK					
			Penyelenggaraan Pendaftaran	Pembinaan Aparatur	135	Kab/Kota	943.000	54	27	73.080	-	19.789	27	44.229	-	-	500	27	64.518	100	88,28	81	64.518	60,00	6,84	FPAK					
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran	30	Dokumen	943.000	12	6	73.080	2	19.789	4	44.229	-	-	500	6	64.518	100	88,28	18	64.518	60,00		FPAK					
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	90,09					60,00	13,09								
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Rendah	Sangat Rendah								
Program, Kegiatan Thn 2020 berbeda dengan Thn 2021																															
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan	80	Persen	943.000	-	-	352.346	-	30.623	-	97.503	-	888	-	211.542	-	340.555	-	96,65	-	340.555			FPAK				
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pengelolaan data layanan	135	Kab/Kota	2.112.000	54	27	352.346	-	30.623	10	97.503	-	888	17	211.542	27	340.555	100	96,65	81	340.555	60,00	16,12	FPAK				
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil	Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil	30	elemen	1.372.000	12	6	287.658	-	-	3	72.640	-	-	3	211.542	6	284.182	100	98,79	18	284.182	60,00		FPAK				
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	30	dok	740.000	12	6	64.688	3	30.623	3	24.863	-	888	-	6	56.373	100	87,15	18	56.373	60,00		FPAK					
			Pemberian Konsultasi																							FPAK					
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	27	Kab/Kota			27																	FPAK	Kegiatan DAK dihapus dipindahkan ke Sekre				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	96,65					60,00	3,65								
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Rendah	Sangat Rendah								
Program, Kegiatan Thn 2020 berbeda dengan Thn 2021																															
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala	84,78	Persen	-	81,23	82,35	629.849	14,69	92.535	66,32	417.716	6,18	38.956	11,77	74.149	99	623.356	120	98,97	180	623.356			PIAK				
			Penataan Pengelolaan																							PIAK					
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan	Jumlah Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan	27	Dok			27																	PIAK	Kegiatan DAK dihapus dipindahkan ke Sekre				
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tingkat Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	160	Dokumen	2.915.000	64	32	409.062	8	33.492	8	291.314	8	24.862	8	55.532	32	405.200	100	99,06	96	405.200	60,00	13,90	PIAK				
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi	135	Dokumen	1.465.000	54	27	191.454	-	23.428	27	113.199	-	17.582	-	37.235	27	191.444	100	99,99	81	191.444	60,00		PIAK				
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah rapat (sosialisasi/fgd) dalam	20	Rapat	1.450.000	8	4	217.608	1	10.064	2	178.115	-	7.280	1	18.297	4	213.757	100	98,23	12	213.757	60,00		PIAK				
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	135	Kab/Kota	1.750.000	54	27	320.787	7	59.043	12	126.402	4	14.093	4	18.617	27	218.156	100	98,81	81	218.156	60,00	12,47	PIAK				
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terkait	135	Dok	950.000	54	27	139.176	-	38.233	27	68.092	-	14.093	-	18.617	27	139.036	100	99,90	81	139.036	60,00		PIAK				
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	Jumlah peserta pembinaan teknis terkait pengelolaan informasi	800	orang	800.000	225	108	81.611	-	20.810	108	58.310	-	-	-	-	108	79.120	100	96,95	333	79.120	41,63		PIAK				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	98,93					60,00	3,30								
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Rendah	Sangat Rendah								
Program, Kegiatan Thn 2020 berbeda dengan Thn 2021																															

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat.
2. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan 2020 dan untuk tahun 2019 hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel II.3.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el)
2. Akurasi data kependudukan di Jawa Barat yang masih harus ditingkatkan. masih cukup tinggi jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil.
3. Terbatasnya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Dukcapil Provinsi hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah.
4. Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri
5. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran.

6. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah
7. Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah;
8. Sarana dan Prasarana kerja yang terbatas.

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan isi-isu penting tersebut telah dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah : **Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Barat berdasarkan satu nama satu data kependudukan.**

Tabel T-II.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Reformasi Birokrasi yang rendah	Belum optimalnya satu nama satu data kependudukan di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Akurasi data kependudukan . - Tingkat penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan belum optimal - Tingkat Pemanfaatan data kependudukan yang masih rendah - Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan masih di bawah target

Tabel T-II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat				81,12%	81,83%	82,63%	83,47%	82,50	82,22	NA	NA	

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Tabel T-II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai		12.975.502.481,-	A	Nilai		12.975.502.481,-	APBD
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Umum	100	Persen			100	Persen			
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen			100	Persen			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	10	Dokumen	Jawa Barat	210.000.000,-	10	Dokumen	Jawa Barat	210.000.000,-	APBD
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	Dokumen	Jawa Barat	105.000.000,-	7	Dokumen	Jawa Barat	105.000.000,-	APBD
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	Jawa Barat	105.000.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	105.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	3	Dokumen	Jawa Barat	8.862.972.937,-	3	Dokumen	Jawa Barat	8.862.972.937,-	APBD
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	Jawa Barat	8.772.972.937,-	14	Bulan	Jawa Barat	8.772.972.937,-	APBD
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	Jawa Barat	90.000.000,-	3	Laporan	Jawa Barat	90.000.000,-	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	45	Orang	Jawa Barat	230.000.000,-	45	Orang	Jawa Barat	230.000.000,-	APBD
3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45	Orang	Jawa Barat	70.000.000,-	45	Orang	Jawa Barat	70.000.000,-	APBD
3.2		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan se Jawa Barat	3	Kali	Jawa Barat	80.000.000,-	3	Kali	Jawa Barat	80.000.000,-	APBD
3.3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek kepada Kab/ Kota	4	Bimtek	Jawa Barat	80.000.000,-	4	Bimtek	Jawa Barat	80.000.000,-	APBD

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	12	Bulan	Jawa Barat	1.738.096.108,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.738.096.108,-	APBD
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Jenis	Jawa Barat	581.366.564,-	12	Jenis	Jawa Barat	581.366.564,-	APBD
4.2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	Jawa Barat	1.156.729.544,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.156.729.544,-	APBD
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12	Bulan	Jawa Barat	1.150.133.436,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.150.133.436,-	APBD
5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Jawa Barat	50.000.000,-	12	Bulan	Jawa Barat	50.000.000,-	APBD
5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	Jawa Barat	1.100.133.436,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.100.133.436,-	APBD
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	Jawa Barat	784.300.000,-	12	bulan	Jawa Barat	784.300.000,-	APBD
6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	Jawa Barat	288.300.000,-	12	bulan	Jawa Barat	288.300.000,-	APBD
6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	12	bulan	Jawa Barat	146.000.000,-	12	bulan	Jawa Barat	146.000.000,-	APBD
6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	12	bulan	Jawa Barat	350.000.000,-	12	bulan	Jawa Barat	350.000.000,-	APBD
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	82,42	Persen	Jawa Barat	387.366.875,-	82,42	Persen	Jawa Barat	387.366.875,-	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	284.185.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	284.185.000,-	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	284.185.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	284.185.000,-	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	103.181.875,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	103.181.875,-	APBD
2.1		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di Kab/ Kota	6	Dokumen	Jawa Barat	103.181.875,-	6	Dokumen	Jawa Barat	103.181.875,-	APBD
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82,42	Persen	Jawa Barat	385.454.830,-	82,42	Persen	Jawa Barat	385.454.830,-	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil	27	Kab/Kota	Jawa Barat	385.454.830,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	385.454.830,-	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil	6	Elemen	Jawa Barat	270.000.000,-	6	Elemen	Jawa Barat	270.000.000,-	APBD
1.2		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan di Kabupaten / Kota	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kab/ Kota	6	Dokumen	Jawa Barat	115.454.830,-	6	Dokumen	Jawa Barat	115.454.830,-	APBD
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	83,57	Persen	Jawa Barat	565.818.138,-	83,57	Persen	Jawa Barat	565.818.138,-	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32	Dokumen	Jawa Barat	191.280.000,-	32	Dokumen	Jawa Barat	191.280.000,-	APBD
1.1		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27	Dokumen	Jawa Barat	95.640.000,-	27	Dokumen	Jawa Barat	95.640.000,-	APBD
1.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah rapat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4	Rapat	Jawa Barat	95.640.000,-	4	Rapat	Jawa Barat	95.640.000,-	APBD
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis	27	Kab/Kota	Jawa Barat	374.538.138,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	374.538.138,-	APBD
2.1		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	27	Dokumen	Jawa Barat	278.898.138,-	27	Dokumen	Jawa Barat	278.898.138,-	APBD
2.2		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	108	Orang	Jawa Barat	95.640.000,-	108	Orang	Jawa Barat	95.640.000,-	APBD
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	APBD
1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan		Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	APBD

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Proffil Kependudukan dan agregat	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	APBD
Jumlah Anggaran Rancangan Awal RKPD							14.385.872.324,-	Jumlah Anggaran Hasil Analisis Kebutuhan			14.385.872.324,-	APBD

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2022, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Disdukcapil yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan usulan dari masyarakat tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan yang terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel T-II.5 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	-	-	-	-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2020 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2016 16 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
- dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan

Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang

ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;
3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2022 sebanyak 5 Program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan

dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan dari DAK Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel T-III. 1 Program dan Kegiatan Indikatif Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.000.000,-
				1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000,-
		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.772.972.937,-
				1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	90.000.000,-
		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,-
				1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,-
				1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,-
		1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	581.366.564,-
				1.4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.156.729.544,-
		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,-
				1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.100.133.436,-
		1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.300.000,-
				1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.000.000,-
				1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan	350.000.000,-
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	284.185.000,-
		2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	2.2.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	103.181.875,-
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	3.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	3.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	270.000.000,-
				3.1.2	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten / Kota	115.454.830,-
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	4.1.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.640.000,-

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran (Rp.)
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Administrasi Kependudukan Provinsi	4.1.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	95.640.000,-
		4.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	4.2.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	278.898.138,-
				4.2.2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	95.640.000,-
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	5.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	71.730.000,-
Jumlah Kebutuhan Dana						14.385.872.324,-

Jumlah Belanja Operasi untuk Tahun 2022 berdasarkan pagu indikatif Rp. 14.385.872.324,- (Empat belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Tabel T-III. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rencana Kerja dan Pendanaan 2022				Rencana Kerja dan Pendanaan 2023				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai		12.975.502.481,-	A	Nilai		18.091.000.000,-	APBD
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Umum	100	Persen			100	Persen			
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	Persen			100	Persen			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	10	Dokumen	Jawa Barat	210.000.000,-	10	Dokumen	Jawa Barat	650.000.000,-	APBD
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	Dokumen	Jawa Barat	105.000.000,-	7	Dokumen	Jawa Barat	175.000.000,-	APBD
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	Jawa Barat	105.000.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	175.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	3	Dokumen	Jawa Barat	8.862.972.937,-	3	Dokumen	Jawa Barat	11.675.000.000,-	APBD
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	Jawa Barat	8.772.972.937,-	14	Bulan	Jawa Barat	11.500.000.000,-	APBD
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	Jawa Barat	90.000.000,-	3	Laporan	Jawa Barat	175.000.000,-	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	45	Orang	Jawa Barat	230.000.000,-	45	Orang	Jawa Barat	830.000.000,-	APBD
3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45	Orang	Jawa Barat	70.000.000,-	45	Orang	Jawa Barat	100.000.000,-	APBD
3.2		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan se Jawa Barat	3	Kali	Jawa Barat	80.000.000,-	3	Kali	Jawa Barat	600.000.000,-	APBD
3.3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek kepada Kab/ Kota	4	Bimtek	Jawa Barat	80.000.000,-	4	Bimtek	Jawa Barat	130.000.000,-	APBD
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	12	Bulan	Jawa Barat	1.738.096.108,-	12	Bulan	Jawa Barat	2.220.000.000,-	APBD
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Jenis	Jawa Barat	581.366.564,-	12	Jenis	Jawa Barat	600.000.000,-	APBD
4.2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	Jawa Barat	1.156.729.544,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.500.000.000,-	APBD
5.			Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12	Bulan	Jawa Barat	1.150.133.436,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.866.000.000,-	APBD

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rencana Kerja dan Pendanaan 2022				Rencana Kerja dan Pendanaan 2023				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Jawa Barat	50.000.000,-	12	Bulan	Jawa Barat	366.000.000,-	APBD
5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	Jawa Barat	1.100.133.436,-	12	Bulan	Jawa Barat	1.500.000.000,-	APBD
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	Jawa Barat	784.300.000,-	12	bulan	Jawa Barat	850.000.000,-	APBD
6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	Jawa Barat	288.300.000,-	12	bulan	Jawa Barat	250.000.000,-	APBD
6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	12	bulan	Jawa Barat	146.000.000,-	12	bulan	Jawa Barat	300.000.000,-	APBD
6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	12	bulan	Jawa Barat	350.000.000,-	12	bulan	Jawa Barat	300.000.000,-	APBD
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	82,42	Persen	Jawa Barat	387.366.875,-	83,30	Persen	Jawa Barat	500.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	284.185.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	250.000.000,-	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	284.185.000,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	250.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	103.181.875,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	250.000.000,-	APBD
2.1		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di Kab/ Kota	6	Dokumen	Jawa Barat	103.181.875,-	6	Dokumen	Jawa Barat	250.000.000,-	APBD
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82,42	Persen	Jawa Barat	385.454.830,-	83,30	Persen	Jawa Barat	600.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil	27	Kab/Kota	Jawa Barat	385.454.830,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	600.000.000,-	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil	6	Elemen	Jawa Barat	270.000.000,-	6	Elemen	Jawa Barat	400.000.000,-	APBD
1.2		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan di Kabupaten / Kota	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kab/ Kota	6	Dokumen	Jawa Barat	115.454.830,-	6	Dokumen	Jawa Barat	200.000.000,-	APBD
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	83,57	Persen	Jawa Barat	565.818.138,-	84,78	Persen	Jawa Barat	1.305.000.000,-	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2021	Rencana Kerja dan Pendanaan 2022				Rencana Kerja dan Pendanaan 2023				Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32	Dokumen	Jawa Barat	191.280.000,-	32	Dokumen	Jawa Barat	825.000.000,-	APBD
1.1		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27	Dokumen	Jawa Barat	95.640.000,-	27	Dokumen	Jawa Barat	400.000.000,-	APBD
1.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah rapat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4	Rapat	Jawa Barat	95.640.000,-	4	Rapat	Jawa Barat	425.000.000,-	APBD
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Penyelenggaran Pembinaan, Pengawasasn dan Bimbingan Teknis	27	Kab/Kota	Jawa Barat	374.538.138,-	27	Kab/Kota	Jawa Barat	480.000.000,-	APBD
2.1		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	27	Dokumen	Jawa Barat	278.898.138,-	27	Dokumen	Jawa Barat	250.000.000,-	APBD
2.2		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Terkait Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	108	Orang	Jawa Barat	95.640.000,-	108	Orang	Jawa Barat	230.000.000,-	APBD
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	150.000.000,-	APBD
1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan		Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	150.000.000,-	APBD
1.1		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Proffil Kependudukan dan agregat	3	Dokumen	Jawa Barat	71.730.000,-	3	Dokumen	Jawa Barat	150.000.000,-	APBD
Jumlah Anggaran Tahun 2022							14.385.872.324,-	Jumlah Anggaran Tahun 2023			20.226.000.000,	APBD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja 2022 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun 2022.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja 2021 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja 2022 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.